

**KEBIJAKAN INDONESIA DALAM  
MENGHADAPI KRISIS  
DIPLOMATIK QATAR DI WILAYAH  
TIMUR TENGAH TAHUN 2017**

**Author :**

**Siti Muslikhati, S.IP., M.Si.**

**Marha Fathu Masturoh Adam**

Program Studi Ilmu Hubungan  
Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul,

Yogyakarta 55183

Email: [marhafmadam05@gmail.com](mailto:marhafmadam05@gmail.com)

***Abstract***

Indonesia became a country with foreign policy which active to follow the activities of international peace, include to facing Qatar's diplomatic crisis in Middle East Region On 2017. Qatar's diplomatic conflict that caused Saudi Arabia, Bahrain, the United Arab Emirates and Egypt severed diplomatic ties with Qatar and blocked all land, sea and air traffic to country of Qatar. Because Qatar has supported terrorism, it has embraced several terrorist and sectarian groups, which Gulf states have disturbed regional stability, such as the Muslim Brotherhood (Ikhawanul Muslimin), ISIS and Al Qaeda. Based on cooperation relations of Indonesia and Qatar in politic, economic,

and others made Indonesia worried about direction of both relations since diplomatic crisis exist in Qatar. Indonesia in their policy to facing diplomatic crisis used total diplomacy which involving stakeholders both from the state (government) and non-state (non-government).

**Keyword : Indonesia, Qatar, Diplomatic Crisis, Foreign Policy, Total of Diplomacy.**

**Abstrak**

Indonesia menjadi sebuah negara dengan politik luar negeri yang aktif terlibat dalam kegiatan atau aktivitas untuk menciptakan perdamaian dunia, termasuk juga dalam upaya penyelesaian krisis diplomatik Qatar di wilayah Timur Tengah tahun 2017. Krisis diplomatik Qatar yang disebabkan oleh adanya keputusan hubungan diplomatik dari Arab Saudi, Bahrain, UEA (Uni Emirat Arab), dan Mesir mengakibatkan adanya blokade di Qatar seperti memblokir semua lalu lintas darat, laut, dan udara ke negara Qatar. Krisis ini bermula dari adanya tuduhan bahwa Qatar mendukung gerakan terorisme dan kelompok sektarian yang dianggap oleh negara-negara teluk lainnya dapat mengganggu stabilitas regional seperti Ikhwanul Muslimin, ISIS dan Al-Qaeda. Berdasarkan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Qatar di bidang politik, ekonomi, dan berbagai

bidang lainnya dapat membuat Indonesia khawatir mengenai arah kerjasama kedua negara sejak adanya krisis diplomatik tersebut di Qatar. Kebijakan Indonesia yang mengupayakan penyelesaian krisis diplomatik Qatar menggunakan total diplomasi yang melibatkan banyak stakeholder yaitu melibatkan dari pihak pemerintah (*state actor*) dan dari pihak non-pemerintah (*non-state actor*).

**Kata Kunci : Indonesia, Qatar, Krisis Diplomatik, Politik Luar Negeri, Total Diplomasi**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara independen yang memiliki politik luar negeri bebas aktif. Prinsip bebas aktif ini menjadi asas dan poros bagi pemerintah Indonesia terhadap arah kebijakan-kebijakan luar negeri yang akan dikeluarkan. Secara historis, politik luar negeri yang berprinsip bebas aktif ini merupakan hasil dari pemikiran Mohammad Hatta. Sedangkan menurut harfiah, makna dari prinsip bebas aktif ini adalah kondisi dimana Indonesia bebas untuk memilih menjadi negara non blok dan ikut aktif dalam hal-hal yang berhubungan dengan hubungan antar negara, baik dalam lingkup regional maupun internasional (Safaat, Public Relations dalam Politik Luar Negeri Indonesia , 2012, hal. 122). Indonesia dibawah pemerintahan presiden Jokowi menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif dengan berdasarkan kepentingan nasional Indonesia. Tercantum dalam nawacita poin pertama bahwa Jokowi menjadikan politik luar negeri sebagai upaya atau usaha untuk meningkatkan ketahanan nasional, agenda pembangunan, dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia melalui prinsip bebas aktifnya juga memprioritaskan agenda-agenda nasional seperti meningkatkan investasi asing dan mempererat diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain. Prioritas itu dibuktikan

oleh Jokowi dengan banyaknya hubungan kerja sama bilateral maupun multilateral baik di bidang pembangunan ekonomi, pendidikan, maupun keamanan dan pertahanan. (Effendi, 2017)

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam banyak menjalin kerja sama dengan negara-negara Islam yang berada di wilayah timur tengah yang dalam hal ini khususnya adalah Qatar. Mengingat usia hubungan diplomatik antara Indonesia dan Qatar sudah terjalin sejak tahun 1976, hubungan bilateral kedua negara semakin membaik dari tahun ke tahun. Kerjasama dalam bidang politik dapat dilihat dari banyaknya kunjungan yang dilakukan oleh kedua Negara. Kunjungan Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah, Dr. Alwi Shihab dan para pengusaha ke Qatar untuk mengadakan pertemuan dengan penasehat Menteri Energi dan Industri, serta pengusaha Qatar Mining, 13 – 14 Juni 2011. Pertemuan ini berlanjut pada 12-16 Oktober 2016. (Kementerian Luar Negeri Indonesia, hal. 105-106) Tidak hanya itu, hubungan politik yang baik kedua negara di antaranya ditandai juga dengan kehadiran Wakil PM H.E. Ahmed bin Abdullah bin Zaid Al Mahmoud pada penyelenggaraan UNAOC di Bali, 29-30 Agustus 2014. Pada tanggal 2 Agustus 2016, Menteri Ekonomi dan Perdagangan Qatar, Y.M. Sheikh Ahmed Bin Jassim Al-

Thani melakukan kunjungan ke Indonesia dengan sekaligus menghadiri acara Konferensi Tingkat Tinggi *World Islamic Economic Forum* 2016. Sedangkan pada awal tahun 2017, Delegasi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dipimpin oleh Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi Dalam Negeri dan Luar negeri serta Pengawas Parlemen Qatar (Majlis as-Shura) yang dipimpin H.E. Muhamad Abdullah Al-Sulaiti di Doha. (Direktorat Informasi dan Media, dan Biro Administrasi Menteri, 2015)

Selain itu, dalam bidang kerjasama ekonomi ditunjukkan dengan adanya peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Qatar dalam perdagangan dan investasi. Untuk mendukung diplomasi ekonomi, KBRI melakukan pendekatan dengan kalangan pemerintah dan dunia usaha Qatar, termasuk *Qatar Chamber of Commerce and Industry*. Selain itu pada 2015 silam pemerintah Indonesia melakukan kesepakatan untuk menandatangani rencana perjanjian kerja sama mengenai adanya bebas visa untuk pihak yang memegang dan memiliki paspor dinas dan diplomatik, pembentukan *Join Investment Company* senilai 1 Milyar dollar, pembangunan pembangkit tenaga listrik antara PT. Pembangkit Jawa Bali dengan *Nebras Power* dan memberikan investasi seharga 500 Juta dollar di

Belawan, Sumatera Utara serta rencana untuk melakukan pengembangan investasi di Qatar dalam bidang pertanian dan infrastruktur. Tidak hanya Indonesia, Qatar pun telah menyusun dan merencanakan beberapa program-program mengenai kerjasama dalam perdagangan dan investasi melalui kunjungan wisman ke Indonesia. Hal ini diupayakan untuk mendorong finalisasi dan agenda untuk menandatangani *Air Service Agreement Indonesia-Qatar*. Upaya tersebut diwujudkan dengan melalui kerja sama dengan perusahaan *Qatar Airways* untuk mendorong masuknya wisman dan meningkatkan ekspor Indonesia ke Qatar. Selain itu, dalam pertengahan 2016, KBRI Doha meresmikan penandatanganan MOU kerja sama kadin Qatar dengan kadin Indonesia. Hal itu diupayakan agar berbagai program pertemuan usaha dapat dilakukan seperti adanya partisipasi yang tinggi untuk menghadiri kegiatan *ASEAN-Qatar Chamber Joint Seminar* dengan melibatkan banyak pengusaha dari Indonesia. Pada akhir tahun 2016, BUMN Qatar yaitu Nebras Power meningkatkan investasinya di Indonesia dengan mengakuisisi 35,5% saham PT Paiton Energy senilai USD 1,35 Milyar. Dalam programnya, Nebras Power akan membangun pembangkit listrik di Belawan Sumatera Utara senilai USD 750. (Kementerian Luar Negeri Republik

Indonesia, 2016). Di bidang ini Indonesia terus mengupayakan peningkatan pengiriman tenaga kerja ahli Indonesia (perawat dan pertambangan) ke Qatar. Di tahun 2011 ini, kedua negara sepakat membahas draft MoU penempatan tenaga kerja ahli Indonesia ke Qatar. Selama paruh pertama tahun 2011, terdapat 552 kasus yang menimpa TKI Indonesia yang bekerja di Qatar. Selama tahun 2011, Pemri telah berhasil memenangkan tuntutan utang darah (diyat) dari keluarga pembunuhan dua orang WNI (PLRT) yaitu Alm. Yayah Salsiah bt Zunaedi dan Alm. Oom Komariah bt Kamid Casem. Pada 25 Mei 2016, pemerintah Qatar melakukan penambahan kuota bagi Tenaga Kerja Indonesia yang terampil sebanyak 24 ribu orang. Aspek pariwisata pun tidak ketinggalan dalam kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak, KBRI yang ada di Doha berusaha untuk mengupayakan promosi pariwisata yang berisikan tampilan salah satu iklan Indonesia yaitu Wonderful dalam tayangan TV Al-Jazeera sebanyak ribuan kali yaitu 7.884 kali hingga pada akhir tahun 2016. Tidak hanya itu, Indonesia juga mendapatkan banyak kunjungan wisata dari Qatar dan melalui kerjasama dengan *Qatar Airways*. Hal ini ditunjukkan untuk meningkatkan perekonomian kedua negara (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016)

Selain kerjasama di bidang ekonomi dan politik, Indonesia juga memiliki hubungan kerjasama di bidang keagamaan dengan Qatar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penandatanganan MoU Kemenag dengan Qatar Charity Indonesia dilakukan oleh Karo KLN Kemenag Achmad Gunaryo dengan Direktur Qatar Charity Karam Zain Aly di depan Sekjen Kemenag Nur Syam, di Kantor Kementerian Agama Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta, pada Januari 2015. Dalam penandatanganan tersebut juga hadir Sekretaris Ditjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin, Kakanwil Jabar, Aceh, Banten, DKI Jakarta, dan Yogyakarta serta pejabat Kemenag lainnya. Adapun pada tanggal 29 April-3 Mei 2016 diadakan pertemuan Ketua DDII yaitu Muhammad Siddik dengan didampingi oleh Wakil Ketua DDII yaitu Abdul Wahid Alwi dan Direktur Eksekutif Lazis Dewan Dakwah Ade Salamun ke Qatar melakukan kerja sama dalam bidang dakwah di antara kedua negara yaitu Indonesia dan Qatar.

Namun, kekhawatiran Indonesia akan menurunnya kerja sama antara Indonesia dan Qatar dimulai ketika Arab Saudi dan negara teluk lainnya termasuk Bahrain, dan UEA memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni tahun 2017. Pemutusan hubungan diplomatik tersebut dikarenakan adanya kesalah-

fahaman antara Qatar dan Saudi, dimana Saudi melontarkan tuduhan bahwa Qatar mendukung gerakan Islam Ikhwanul Muslimin dan Hizbullah, serta adanya kedekatan yang lebih serius dengan Iran yang merupakan musuh dari Arab Saudi karena bermazhab Syiah. (BBC Indonesia, 2017)

Adanya konflik diputuskannya hubungan diplomatik oleh negara Arab Saudi dan negara teluk lainnya tidak disetujui oleh Qatar. Hal ini dikarenakan, adanya tuduhan yang tidak benar dari Saudi. Namun, respon Qatar tidak menjadikan krisis diplomatik tersebut berakhir. Konflik ini pun menjadi sorotan di dunia Internasional, hal itu terlihat dari banyaknya negara yang terlibat dalam penyelesaian krisis diplomatik Qatar. Salah satunya adalah Turki yang melibatkan diri secara langsung untuk menyelesaikan konflik tersebut. Presiden Erdogan telah menyatakan sikapnya untuk mendukung secara penuh terhadap Qatar dan menjadikan negaranya siap membantu untuk menyelesaikan krisis diplomatik yang terjadi di negara-negara teluk tersebut. Dukungan Turki terlihat dari banyaknya bantuan materi seperti bahan pokok yang dikirimkan untuk masyarakat di Qatar dan membahas penyelesaian krisis diplomatik dengan pemerintah-pemerintah negara teluk lainnya, seperti Arab Saudi dan Kuwait. (BBC News, 2017)

Krisis diplomatik Qatar ini juga menjadi sorotan bagi Indonesia. Mengingat banyaknya hubungan kerjasama yang sudah terjalin lama dengan Qatar, Indonesia pun melakukan berbagai tindakan untuk menghadapi krisis tersebut. Hal inilah yang menarik penulis untuk meneliti lebih jauh lagi tentang sikap Indonesia terhadap krisis diplomatik Qatar.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam karya tulis ini yaitu metode kualitatif dengan mengolah sumber-sumber yang bisa didapat dari Studi media massa atau *Media research*, yaitu mengumpulkan data dari berbagai media massa seperti internet, koran, majalah, jurnal dan lain sebagainya untuk menemukan referensi lain sebagai sumber data. Adapun unit Analisis dari penelitian ini adalah negara Indonesia dan Qatar.

### **KERANGKA TEORITIK**

#### **1. Konsep Politik Luar Negeri**

Definisi politik luar negeri menurut Rosenau adalah upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. (Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, 2005, hal. 47-49)

Suatu negara lazimnya berusaha mewujudkan tujuan nasionalnya melalui formulasi kebijaksanaan politik luar

negeri. Dalam hal ini Holsti berpendapat bahwa: Kebijakan, sikap atau tindakan suatu negara merupakan output politik luar negeri dengan berlandaskan pemikiran, serta pola tindakan yang disusun oleh para pembuat keputusan untuk (1) menanggulangi permasalahan, (2) mengusahakan perubahan dalam lingkungan internasional. (Holsti, 1992, hal. 21)

Dalam hal ini, jika melihat sikap Indonesia dalam menghadapi krisis diplomatic Qatar tentu tidak terlepas dari adanya kepentingan domestik Indonesia. Salah satu sikap Indonesia adalah Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk mengambil peran dalam penyelesaian krisis diplomatik Qatar tersebut. Melihat dari banyaknya kerjasama antara kedua negara baik dari segi perdagangan dan investasi serta tenaga kerja, menjadi salah satu tujuan ataupun pertimbangan Jokowi untuk mengambil sikap dalam krisis diplomatik ini. (Waluyo, Indonesia Siap Ambil Peran Solutif Krisis Qatar, 2017)

Berdasarkan konsep politik luar negeri menurut K.J. Holsti, sikap Indonesia dalam menghadapi krisis diplomatik Qatar di kawasan Timur Tengah tentu bertujuan untuk menanggulangi permasalahan dan mengusahakan perubahan lingkungan Internasional. Hal ini sangat terlihat dari tindakan Jokowi yang telah melakukan

komunikasi melalui via telepon dengan pemerintah-pemerintah Negara lain, salah satu diantaranya adalah Presiden Erdogan. Komunikasi tersebut dilakukan untuk membahas krisis Qatar dan mencari jalan ataupun solusi dalam menyelesaikan krisis diplomatik yang tengah berlangsung tersebut. (BBC News, 2017)

## **2. Konsep Diplomasi**

Kata diplomasi dalam ruang lingkup hubungan internasional tidak akan terlepas dari kata politik luar negeri. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki tujuan dan fungsi yang sama yaitu untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional suatu negara. Tetapi, di sisi lain politik luar negeri dan diplomasi merupakan dua hal yang berbeda yaitu jika politik luar negeri itu lebih berkaitan dengan perumusan suatu keputusan, maka diplomasi dihubungkan dengan pelaksanaan dari keputusan yang diambil oleh suatu negara. Dalam definisi diplomasi menurut Sir Ernest Satow, diplomasi diartikan sebagai aplikasi dari intelijen dan taktik ataupun strategi untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat kemudian diperluas hubungan negara tersebut dengan hubungan negara-negara jajahannya. (Satow, 1922, hal. 1) Definisi tersebut, jelaslah bahwa diplomasi menyangkut aspek yang sangat luas, baik mengenai cara, kebijakan, orang, lembaga maupun

profesi. Namun diplomasi ini pada umumnya merujuk pada seni, teknik dan cara bagaimana kita mengadakan pendekatan ataupun perundingan (negosiasi) untuk memperjuangkan kepentingan nasional suatu negara dan langkah-langkah yang di ambil untuk mengamankan kepentingan tersebut, disamping membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan Negara-negara lain. Studi diplomasi mengalami perkembangan pesat sejak berakhirnya perang dingin. Perubahan disebabkan meningkatnya peran aktor-aktor bukan negara pada era 1990-an, seperti media massa, NGO internasional dan individu. Hal ini menyebabkan negara bukan lagi sebagai aktor utama diplomasi maupun faktor utama pendukung kepentingan nasional. Revolusi teknologi menjadikan aktivitas diplomasi tidak lagi menjadi suatu tugas bagi diplomat profesional, melainkan sudah menjadi tugas bagi masyarakat luas untuk mewujudkan kepentingan kelompok khususnya kepentingan negaranya. Keterlibatan masyarakat luas melalui diplomasi publik ini merupakan sebuah kecenderungan baru di era globalisasi yang ditujukan sebagai ungkapan kepedulian dan tanggung jawab terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan luar negeri dan perdamaian dunia. Revolusi tersebut mengakibatkan adanya perubahan penting

dalam praktik diplomasi khususnya dalam peran diplomat dan peran Departemen Luar Negeri. Selain itu, terdapat peningkatan peran media massa, tumbuhnya aktor-aktor yang menjalankan diplomasi publik, serta meningkatnya peran NGOs dan INGOs. (Djelantik, 2008, hal. 15)

Di era reformasi saat ini juga memiliki beragam jenis diplomasi lainnya, salah satunya adalah diplomasi total. Hakikatnya diplomasi total ini merupakan bentuk negosiasi yang dilakukan oleh suatu negara dengan melibatkan banyak pihak dari setiap komponen yang ada di suatu negara, yaitu tidak menggunakan keterlibatan pemerintah dengan aktor pemerintah sebagai satu-satunya cara untuk berdiplomasi, akan tetapi diplomasi total ini juga melibatkan pihak swasta melalui jaringan-jaringan informal. Konsep diplomasi total ini pernah dikemukakan oleh Mohammad Hatta pada awal periode kemerdekaan, akan tetapi mulai ramai dibahas pada masa Noer Hassan Wirajuda menjabat sebagai pemimpin Kementerian Luar Negeri RI tahun 2001-2009. Total diplomasi memiliki banyak kontribusi berupa langkah kreatif dan inovatif yang dikembangkan oleh semua komponen bangsa. Implementasi dari total diplomasi ini didasarkan pada asumsi yang sederhana; yaitu pemerintah tidak dapat

berdiri sendiri untuk mengatasi berbagai tantangan dalam isu-isu Internasional yang semakin kompleks dan rumit sehingga menuntut keterlibatan banyak stakeholder.

Banyaknya stakeholder yang dilibatkan oleh suatu negara dalam total diplomasi, pemerintah suatu negara yakin dan percaya bahwa upaya diplomasi akan berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas pada masyarakat internasional. Harapan pemerintah dalam keterlibatan banyak stakeholder, dapat membuka jalan ataupun memberikan solusi awal bagi negosiasi yang lebih fokus oleh wakil-wakil pemerintah. Hal ini dikarenakan, jika proses diplomasi tradisional masih dilakukan dan dikembangkan melalui mekanisme *government to government relations*, maka total diplomasi ini menawarkan suatu solusi yang lebih efektif dalam aktivitas berdiplomasi yaitu dengan menambahkan stakeholder yang lainnya seperti pada *government to people* bahkan pada *people to people relations*. Tujuan dari total diplomasi adalah agar masyarakat internasional mempunyai persepsi ataupun pandangan yang baik tentang suatu negara yang dapat dijadikan sebagai landasan sosial bagi hubungan dan pencapaian kepentingan yang lebih luas. Tujuan lainnya dari diplomasi total adalah untuk mengurangi atau menyelesaikan konflik melalui pemahaman komunikasi dan saling



pengertian serta mempererat jalinan hubungan antar-aktor internasional sehingga ketegangan, kemarahan, ketakutan, dan salah persepsi dapat diminimalisir atau dikurangi, selain itu juga dapat menambah pengalaman dalam berinteraksi, mempengaruhi pola pikir dan tindakan pemerintah dengan menjelaskan akar permasalahan, perasaan, kebutuhan, dan mengeksplorasi pilihan-pilihan diplomasi tanpa prasangka, dan tujuan terakhir adalah untuk memberikan landasan bagi terselenggaranya negosiasi-negosiasi yang lebih formal serta merancang kebijakan pemerintah. Walaupun dalam diplomasi total melibatkan banyak aktor, tetapi faktanya Kementerian Luar Negeri tetap harus memegang peran sentral. Tujuannya agar peran diplomat tidak terdegrasi meskipun secara *de facto* diplomat tidak dapat berdiri sendiri. (Wangke, 2016, hal. 5-7)

Berdasarkan konsep diplomasi yang dikemukakan oleh sir Ernest Satow dan Barston, upaya-upaya Indonesia dalam mendukung penyelesaian krisis diplomatik Qatar merupakan serangkaian strategi diplomasi yang tentunya tidak terlepas dari adanya kepentingan nasional. Dalam hal ini dengan banyaknya kerja sama antara Indonesia dan Qatar, menghantarkan pemerintah resmi khususnya presiden Jokowi ikut berpartisipasi dalam penyelesaian krisis ini. Seperti halnya yang

telah dilakukan oleh presiden Jokowi yaitu berkomunikasi dengan presiden Turki dan Menteri Luar Negeri Qatar untuk membahas tentang krisis Qatar dan penyelesaiannya. Selain presiden, Bu Retno Marsudi sebagai menteri luar negeri juga telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan krisis diplomatik Qatar, yaitu dengan melakukan pertemuan dengan berbagai pemerintah dari negara lain untuk membahas penyelesaian krisis Qatar. Sejak krisis Qatar mengemuka, Menlu Retno telah melakukan upaya komunikasi dengan sejumlah Menlu dari negara kunci, seperti Arab Saudi, UEA dan Qatar yang menjadi pihak dalam konflik, maupun dengan Menlu lainnya, antara lain Uni Eropa, Jerman, Turki, Kuwait, dan Iran yang dipandang dapat berkontribusi terhadap penyelesaian konflik. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017)

Merujuk pada perkembangan diplomasi yang telah dikemukakan sebelumnya, Indonesia saat ini juga meranah pada arah diplomasi total yang tidak hanya melibatkan aktor-aktor pemerintah saja, tetapi juga melibatkan *non state actor*. Keterlibatan dari pihak pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri dapat terlihat dari adanya sikap dari duta besar Indonesia untuk Qatar yang telah melakukan kunjungan dan komunikasi terhadap WNI yang berada di

Qatar untuk memastikan dan memberikan perlindungan terhadap WNI selama krisis. Selain itu, adanya kunjungan delegasi RI yaitu wakil ketua DPR RI, Fadli Zon ke doha untuk melakukan pertemuan dengan menteri luar negeri Qatar dalam rangka membahas krisis Qatar dan arah kerjasama antara Indonesia dan Qatar selama krisis diplomasi Qatar berlangsung. Sedangkan untuk keterlibatan dari *non state actor* dapat dilihat dari adanya suara atau tanggapan dari ketua MUI yang merupakan organisasi islam yang berpengaruh di Indonesia. Beliau menyarankan kepada pemerintah agar solutif dalam menyelesaikan krisis diplomatik Qatar. Tidak hanya menyarankan saja, tetapi beliau pun menekan pemerintah Indonesia khususnya presiden agar sebaiknya Indonesia mengambil sikap sebagai fasilitator dalam krisis diplomatik ini dan tidak sebagai mediator. Hal ini dikarenakan masyarakat muslim yang dominan di Indonesia, sehingga akan lebih efektif jika Indonesia menyediakan fasilitas untuk pertemuan pemerintah-pemerintah yang bersengketa agar dapat mencapai satu kesepakatan damai untuk krisis diplomatik Qatar.

## **HASIL DAN ANALISIS**

Setelah adanya krisis diplomatik yang terjadi di Qatar pada 2017 silam, kekhawatiran Indonesia terhadap hubungan kerjasama yang semakin

meningkat ini akan terkena dampak dari adanya krisis diplomatik tersebut. Untuk itu, Indonesia sudah mengambil beberapa sikap dan kebijakan untuk menghadapi krisis ini dengan tujuan agar dampak buruk/negatif bisa dapat teratasi dan dampak positifnya bisa dapat dipertahankan/ditingkatkan.

Adapun upaya Indonesia dalam penyelesaian krisis diplomatik Qatar ini, pemerintah menggunakan total diplomasi yang melibatkan berbagai stakeholder dalam penyelesaian krisis diplomatik Qatar ini. Artinya, upaya penyelesaian ini tidak hanya ditanggapi atau dilakukan oleh aktor negara saja tetapi juga melibatkan aktor bukan negara. Keterlibatan *non state actor* ini dapat dilihat dari adanya peran dari ketua dewan pertimbangan MUI yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menyelesaikan krisis diplomatik Qatar. Keterlibatan MUI dalam penyelesaian krisis ini tentu dilatarbelakangi oleh adanya hubungan kerjasama pendidikan dan keagamaan antara Indonesia dan Qatar yang sudah terjalin lama.

### **A. Aktor Negara yang Terlibat Dalam Penyelesaian krisis Diplomati Qatar**

#### **1. Presiden dan Wakil Presiden**

Dari pemerintah khususnya Presiden Jokowi mengupayakan agar Indonesia mengambil peran solutif dalam menghadapi krisis diplomatik Qatar. Beliau mengungkapkan niat tekadnya agar

Indonesia ikut dalam upaya penyelesaian krisis diplomatik. Semenjak adanya keputusan pada 5 Juni 2017 silam, Jokowi melakukan komunikasi dengan pemerintah-pemerintah yang terlibat untuk mengetahui penyebab krisis yang sebenarnya. Presiden Jokowi sudah berkomunikasi melalui telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al-Tsani, dan Raja Uni Emirat Arab Syekh Mohammed bin Rasyid Al Maktoum untuk membahas penyelesaian krisis. (Waluyo, Indonesia Siap Ambil Peran Solutif Krisis Qatar, 2017)

Adapun Jusuf Kalla sebagai wakil presiden Indonesia dalam menyikapi krisis diplomatik Qatar ini menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada negara manapun dalam menyikapi krisis akibat keputusan hubungan diplomatik Qatar oleh sejumlah negara Arab lain di Timur Tengah. Menurut Jusuf Kalla salah satu alasan Indonesia tak berpihak adalah karena pemerintah masih mempelajari polemik yang terjadi di sana. Menurut Jusuf Kalla, Kementerian Luar Negeri Indonesia masih mempelajari seluruh detail masalah di Qatar. Hingga saat ini pun Jusuf Kalla menyampaikan bahwa, laporan secara berkala sudah diberikan untuk melihat apa saja dampak yang akan diterima baik sekarang atau nanti.

Pria nomor dua di Indonesia itu menambahkan duta besar Indonesia yang berdomisili di Timur Tengah diminta aktif untuk melihat segala perkembangan yang terjadi. Namun secara pasti, Jusuf Kalla berharap kejadian di sana bisa diselesaikan dengan damai. Bahkan Jusuf Kalla menyatakan bahwa Indonesia siap menjadi mediator dalam penyelesaian krisis diplomatik Qatar, dan peran mediator ini akan diambil oleh Indonesia apabila diminta dan didorong oleh pemerintah-pemerintah negara lain yang juga ikut berupaya dalam penyelesaian krisis diplomatik Qatar. (Pratama, 2017)

## ***2. Kementerian Luar Negeri dan Dubes RI di Doha***

Selain Presiden Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla, Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia sudah mengambil beberapa langkah untuk membuktikan bahwa Indonesia juga ikut dalam penyelesaian krisis ini. Sejak krisis Qatar mengemuka, Menlu Retno telah melakukan upaya komunikasi dengan sejumlah Menlu dari negara kunci, seperti Arab Saudi, PEA dan Qatar yang menjadi pihak dalam konflik, maupun dengan Menlu lainnya, antara lain Uni Eropa, Jerman, Turki, Kuwait, dan Iran yang dipandang dapat berkontribusi terhadap penyelesaian konflik. Secara khusus Menlu menginformasikan dua kali komunikasinya dengan Menlu Kuwait,

karena Kuwait dipandang dapat berperan sebagai penengah seperti saat terjadi krisis politik serupa pada tahun 2014.

Pada 15 Juni 2017 silam, Retno Marsudi, menerima utusan khusus presiden Persatuan Emirat Arab (PEA), Abdul Rahman bin Mohammed Al-Owais yang saat ini menjabat Menteri Kesehatan dan Pencegahan PEA di Gedung Pancasila. Dalam pembicaraan keduanya, Utusan Khusus PEA menyampaikan apresiasi atas peran aktif Indonesia untuk membantu penyelesaian damai krisis di Kawasan Teluk. Dalam hal ini, Indonesia dinilai sebagai negara yang bersahabat kepada semua pihak, dan terus berupaya menciptakan kondisi kondusif bagi berlangsungnya dialog. Menlu RI menyampaikan bahwa Indonesia mengikuti secara dekat dan prihatin dengan perkembangan situasi di Timur Tengah saat ini. Kedua Menteri sepakat bahwa upaya mediasi yang tengah dilakukan oleh Kuwait adalah langkah terbaik. Indonesia dan PEA mendukung langkah mediasi yang digagas oleh Kuwait ini.

Menlu Retno menekankan pula pentingnya semua pihak untuk menahan diri dan tidak melakukan langkah-langkah yang akan memperburuk situasi. Menlu Retno juga berharap semua pihak selalu mengedepankan dialog dan rekonsiliasi dengan menjajaki semua jalan damai yang

memungkinkan. Tidak hanya itu, Menlu Retno Marsudi mengharapkan setiap pihak dapat menjadi bagian dari solusi, karena jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, ramifikasinya akan sangat luas, baik bagi dunia Islam, maupun keamanan global.

Retno menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi. Hal ini disambut baik oleh para menteri. Kunjungan ini dinilai sebagai respons Timur Tengah atas kesiapan Indonesia untuk membantu krisis yang tengah terjadi di sana. Selain itu, Menlu Retno terus berkoordinasi dengan Dubes Indonesia untuk Doha, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhamad Basri Sidehabi, untuk memastikan keselamatan dan keamanan para WNI di Doha yang saat ini berjumlah sekitar 29 ribu. Mengingat banyaknya isu-isu global yang telah terjadi khususnya di Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri membangun sistem penanganan kasus WNI di luar negeri melalui penguatan strategi perlindungan, antara lain dengan penguatan sistem kelembagaan, penguatan diplomasi perlindungan dan *grand design* penyelesaian kasus. Penguatan koordinasi dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan terkait merupakan suatu keniscayaan sebagai bagian dari upaya pencegahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI mendorong penetapan kebijakan moratorium penempatan TKI

sektor domestik secara menyeluruh terutama di Timur Tengah serta pembenahan pada sektor-sektor lainnya telah mendapat dukungan Kemenaker dan BNP2TKI dan diharapkan dapat ditetapkan dalam waktu dekat. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017)

Duta Besar RI untuk Qatar Marsekal Madya TNI (Purn), Muhamad Basri Sidehabi saat ini tengah melakukan koordinasi dengan otoritas setempat guna memastikan keamanan dan keselamatan WNI di Qatar. Pasca terjadinya krisis diplomatik, dubes RI melakukan pertemuan dengan masyarakat Indonesia di kompleks Al-Khor Community (AKC). Dalam pertemuan itu, dubes RI menyampaikan kepada WNI di Qatar bahwa tidak perlu adanya langkah-langkah yang berlebihan dalam menyikapi krisis Qatar, beliau melanjutkan bahwa situasi dan kondisi kemananan di Qatar masih aman dan terkendali. Kunjungan ke Al Khor tersebut merupakan upaya KBRI untuk menunjukkan kepada WNI di Qatar bahwa kondisi politik dan keamanan berjalan normal seperti biasanya. ( Situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017)

Dubes RI yang didampingi Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Doha, Endang Kuswaya dan Pelaksana Fungsi Politik, Boy Dharmawan juga melakukan pemantauan langsung di berbagai tempat,

termasuk di jalan-jalan dan kondisi pusat pebelanjaan serta keramaian lainnya. Walaupun menurut KBRI Doha tidak terdapat tanda-tanda eskalasi politik dan keamanan, namun menurut Basri ada peningkatan keamanan khususnya kawasan yang dianggap penting seperti pusat pemerintahan, tempat-tempat ibadah, bandara, stasiun, terminal bis, dan fasilitas publik yang biasanya ramai dikunjungi masyarakat. KBRI juga telah mempersiapkan langkah guna mengantisipasi kondisi di lapangan.

Selain itu, Basri juga menyampaikan bahwa Indonesia mengharapkan semua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah ini. Indonesia juga menekankan kembali agar semua negara yang tengah bertikai bisa menghormati prinsip hubungan internasional. (Kertopati, Qatar Dikucilkan Negara Arab, Dubes RI Sebut WNI Aman, 2017)

### ***3. Berbagai Departemen Kementerian dan Wakil Ketua MPR***

Dalam upaya penyelesaian krisis diplomatik Qatar ini, Menteri Perdagangan Indonesia, Enggartiasto Lukita mengatakan akan memantau dampak krisis politik yang terjadi di Qatar dan sejumlah negara Arab lain. Kementerian, kata dia, akan terus

memonitor dan memantau perkembangan permasalahan di Timur Tengah untuk memastikan dampaknya bagi Indonesia. Enggar menilai kisruh diplomatik antara Qatar dan sejumlah negara Arab belum terasa dampak negatifnya bagi perekonomian Indonesia. Penilaian ini disampaikan oleh beliau saat berada di Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta. Selanjutnya ia mengatakan bahwa peluang perdagangan sejumlah komoditas Indonesia ke Qatar belum terlalu mendapatkan dampak yang signifikan terhadap Indonesia, Enggar menilai sejauh ini masih tidak ada gangguan, tapi kedepannya Enggar belum bisa memastikan dan menjamin kondisi perekonomian Indonesia selama perseteruan diplomatik ini belum menemui titik temu. Untuk itu, menteri perdagangan selalu memonitor dan terus memantau perkembangan dari krisis diplomatik yang terjadi di Qatar. (Priyanto, 2017)

Adapun dari menteri agama Indonesia menyatakan akan memantau langsung pelaksanaan haji 2017 di Jeddah. Hal ini tentu dilakukan untuk menghindari adanya dampak buruk yang akan terjadi pada jamaah haji Indonesia mengingat adanya perseteruan antara Qatar dan negara-negara teluk lainnya termasuk Arab Saudi. Di Arab Saudi, sebagai Amirul Haj, Lukman akan

memimpin langsung penyelenggaraan ibadah haji jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Menteri Lukman mengatakan ada tiga misi yang ia jalankan sebagai Amirul Haj. Pertama, mengkoordinasi langsung kerja sama antarberbagai institusi dalam kepanitiaan ibadah haji Indonesia. Menurut Lukman, penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional yang melibatkan banyak pihak selain Kementerian Agama. Pihak-pihak terkait itu beberapa di antaranya adalah Kementerian Kesehatan, TNI, dan Polri. Kedua, memberikan konsultasi atau saran ketika muncul persoalan-persoalan luar biasa di lapangan. Menurut Menag, dalam setiap penyelenggaraan haji, sering muncul persoalan-persoalan aktual yang perlu mendapatkan bimbingan dan masukan dari Amirul Haj. Persoalan itu bisa terkait masalah keagamaan, seperti manasik haji, atau hal teknis pengorganisasian dalam penyelenggaraan haji. Dan, misi ketiga adalah melakukan kontrol terhadap para petugas agar dapat bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. (Kardi, 2017)

Krisis diplomatik Qatar ini bisa berdampak pada jamaah haji Indonesia karena adanya blokade penerbangan Qatar Airways untuk melewati Jeddah/Arab Saudi. Untuk itu, menteri luar negeri melakukan komunikasi dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Agama untuk

berkoordinasi mencari solusi bagi jamaah umroh kita yang ada di Arab Saudi. Begitupun dengan yang akan berangkat juga dilakukan pengalihan-pengalihan kepada maskapai lainnya. Sementara di Indonesia, kementerian perhubungan memindahkan jemaah umrah yang menggunakan Qatar Airways ke maskapai lain.

Sedangkan dari kementerian ketenagakerjaan RI (Kemenaker) menghimbau kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Qatar agar dapat berkomunikasi secara intensif dan selalu mengakses informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Doha, Qatar. Para TKI juga diminta tetap tenang dan waspada selama di sana. Imbauan tersebut berkaitan dengan krisis politik di Qatar yang terjadi. Krisis tersebut merupakan dampak dari keputusan beberapa negara di Timur Tengah untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan Qatar. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan RI, R Soes Hindharno mengatakan bahwa komunikasi dengan Atase Ketenagakerjaan di KBRI Doha harus lebih intensif. Sehingga jika ada kebijakan dari pemerintah RI terkait perlindungan TKI di Qatar dapat cepat tersosialisasi.

Menindaklanjuti krisis tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker RI juga mengeluarkan surat edaran untuk perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) agar lebih berhati-hati dan mempertimbangkan faktor keamanan dan perlindungan TKI sebelum menempatkan mereka. PPTKIS juga diminta membantu mempermudah keluarga TKI yang membutuhkan informasi terkait keberadaan TKI di Timur Tengah. Selain itu, PPTKIS pun diimbau untuk berkoordinasi dengan agensi penempatan TKI di Qatar dan Atase Ketenagakerjaan di KBRI Doha guna memantau keberadaan para TKI. Soes Hindharno mengatakan sejauh ini keberadaan TKI di Qatar masih aman sehingga belum mengharuskan pemerintah melakukan evakuasi dan pemulangan TKI. Namun, kata Soes, pihaknya sudah memerintahkan Atase Ketenagakerjaan RI di Doha Qatar untuk terus memantau situasi yang terjadi Qatar. (Kompas, 2017)

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap krisis diplomatik yang melanda Qatar, karena negara-negara yang berseteru tersebut adalah anggota OKI yang dikhawatirkan akan memecah persatuan dan kekuatan Islam. Terkait dengan peran Indonesia dalam krisis tersebut, Hidayat mendukung pernyataan Menteri Luar Negeri RI yang menyatakan

akan memediasi dan berkontribusi menghadirkan solusi agar kondisi yang terbaik kembali di kawasan Teluk, juga di kawasan negara-negara OKI lainnya. Menurut Hidayat, Indonesia semestinya tidak hanya menawarkan diri, tapi langsung berperan aktif seperti yang dilakukan Turki. Pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 itu jelas ditegaskan pada alinea terakhir bahwa Indonesia terlibat menjaga perdamaian dunia. Menurut Hidayat, ini adalah satu hal penting yang harus betul-betul dilaksanakan. Terlebih Indonesia berada pada pihak yang diterima kedua belah pihak, baik oleh Qatar maupun oleh pihak Arab Saudi dan negara Arab lainnya. Hidayat pun menambahkan bahwa Indonesia harus melihat krisis ini sebagai kesempatan yang sangat bagus untuk tampil dan membuktikan kepemimpinannya di tingkat dunia untuk menghadirkan solusi. Dalam sejarah, Indonesia memiliki *track record* yang baik berkiprah dalam penyelesaian masalah di Asia Tenggara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia harus memaksimalkan perannya menjadi fasilitator islah agar permasalahan di Timur Tengah, dalam konteks ini di negara-negara Teluk, segera selesai dan menghadirkan suasana damai di Timur Tengah. (Ratya, 2017)

## **B. Aktor *Non State* (Bukan Negara) yang Terlibat Dalam Penyelesaian Krisis Diplomatik Qatar**

Melihat perkembangan atas krisis perdamaian di negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Arab Saudi yang memutuskan hubungan dengan Qatar, Dewan Pertimbangan MUI menggelar pertemuan dengan puluhan perwakilan tokoh Ormas Islam di Kantor MUI, Jakarta Pusat pada 7 Juni 2017. Rapat tersebut dipimpin Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Din Syamsuddin. Dalam pertemuan itu, Din meminta saran dan pendapat dari tokoh ormas Islam yang hadir. Saran-saran tersebut ditampung untuk menyerukan pesan bersama terkait ketegangan negara Islam yang bisa memicu peperangan tersebut. Menurut Din, seiring berjalannya waktu tidak menutup kemungkinan akan ada serangan untuk saling melukai antara negara-negara tersebut. Prof. Din menilai, bila konflik ini dibiarkan, dikhawatirkan akan ada perseteruan lanjutan yang bahkan bisa berdampak pada perang saudara antar sesama umat Islam.

Pada 8 Juni 2017, MUI mengeluarkan 6 seruan untuk perdamaian di Qatar. Seruan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi, diantara butir-butir seruan tersebut adalah sebagai berikut: (Admin MUI, 2017)



1. MUI mengharapkan kepada semua negara yang sedang bertikai yaitu Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Libya dan Maladewa untuk menahan diri, tidak memberikan komentar yang dapat memanaskan situasi dan lebih mengedepankan mekanisme dialog, negosiasi dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah.
2. MUI mengimbau kepada semua negara untuk menghormati prinsip-prinsip hubungan internasional, seperti saling menghormati kedaulatan masing-masing negara, tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain dan turut serta menjaga perdamaian dunia.
3. MUI mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk berperan menjadi mediator dan negosiator di antara negara yang sedang berkonflik. Memprakarsai untuk dilaksanakan dialog damai dengan semua negara untuk mencari solusi yang terhormat dan bermartabat.
4. MUI mengajak semua pihak untuk menyatukan langkah dalam memerangi terorisme dan berkontribusi dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan serta keamanan global.
5. MUI meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi

perkembangan situasi keamanan serta menyiapkan langkah-langkah darurat untuk pengamanan bagi WNI yang berada di Qatar, Arab Saudi dan semua negara yang sedang berkonflik.

6. MUI mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan koordinasi dengan otoritas negara setempat guna memastikan keamanan dan keselamatan seluruh WNI di Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Libya dan Maladewa.

Setelah mengeluarkan seruan, Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsudin melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang bertempat di rumah dinas Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada 12 Juni 2017. Din Syamsuddin menyampaikan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk segera melakukan rekonsiliasi atau “islah” kepada para negara-negara Arab ini. Indonesia pun diminta untuk mendesak OKI untuk melakukan sidang darurat guna mencegah perpecahan yang mungkin terjadi di wilayah Timur Tengah ini jika tidak ada tindakan yang berarti untuk penyelesaian konfliknya. Menurut Din peristiwa konflik ini bukanlah peristiwa kecil yang bisa dianggap remeh, krisis itu akan membawa

dampak berantai terhadap negara-negara Islam lainnya, termasuk Indonesia. Din mengatakan Indonesia dapat menampilkan peran sebagai penengah yang baik. Indonesia menurutnya harus segera mengirim utusan yang dikenal baik di Timur Tengah.

Walaupun, Din Syamsuddin tidak mengetahui mekanismenya, ia menyarankan kepada Indonesia untuk mengambil prakarsa seperti (melangsungkan pertemuan) bukan di kawasan Timur Tengah, tetapi di Jakarta atau di tempat lain. MUI juga mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan pertemuan sidang darurat OKI atas undangan Indonesia, atau bisa juga dengan menggelar sidang darurat negara-negara Islam atau tokoh-tokoh Islam, yang tak hanya melibatkan pemimpin pemerintahan tetapi pemimpin umat atau masyarakat. Din juga menilai Indonesia harus memanfaatkan organisasi OKI yang mayoritas berisi negara Islam di kawasan. Meski meminta bantuan OKI melalui sidang darurat akan sulit dilakukan karena markas besarnya ada di Jeddah dan sekjenjnya berasal dari Arab Saudi. (A15, 2017)

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosdakarya.
- Barston, R. (1997). *Modern Diplomacy*. New York: Longman.
- Djelantik, S. (2008). *Diplomasi antara Teori & Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fulton, B. (1998). *Reinventing Diplomacy in The Information Age*. Washington DC: CSIS.
- Holsti, K. (1992). *Politik Internasional : Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta.
- Satow, S. E. (1922). *A Guide To Diplomatic Practice*. New York: Longman Green & Co.
- Watson, A. (1984). *The Dialogue Between States*. London: Methuem.

### Jurnal :

- Safaat, A. S. (2012). Public Relations dalam Politik Luar Negeri Indonesia . *Journal Unair pdf*.
- Wangke, H. (2016). Keberhasilan Diplomasi Total. *Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. VIII, No. 10/II/P3DI/Mei/2016*.

### Internet/Website:

- Situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2017, Juni 6). *Dubes RI Imbau WNI di Qatar untuk Tetap Tenang*. Dipetik Januari 16, 2019, dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia:  
<https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Dubes-RI-Imbau-WNI-di-Qatar-untuk-Tenang-dan-Waspada.aspx>
- A15. (2017, Juni 14). *Dampak Pengucilan Qatar Bagi Indonesia*. Dipetik Maret

- 3, 2019, dari Pinter Politik:  
<https://pinterpolitik.com/dampak-pengucilan-qatar-bagi-indonesia/>
- Admin MUI. (2017, Juni 8). *Enam Seruan MUI untuk Perdamaian Qatar*. Dipetik Maret 3, 2019, dari MUI:  
<https://mui.or.id/berita/enam-seruan-mui-untuk-perdamaian-qatar/>
- BBC Indonesia. (2017, Juni 6). *Krisis Qatar : Empat Faktor Kejengkelan Tetangga Arab*. Dipetik Maret 22, 2018, dari BBC Indonesia:  
<http://www.bbc.com/indonesia/dunia-40169036>
- BBC News. (2017, Juni 10). *Jokowi Ingin Indonesia Berperan Dalam Penyelesaian Konflik Timur Tengah*. Dipetik Desember 4, 2018, dari BBC News Indonesia:  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40232544>
- BBC News. (2017, Juli 23). *Turkey's Erdogan Calls For Swift End To Gulf Dispute*. Dipetik Desember 4, 2018, dari Qatar Crisis:  
<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40697432>
- Direktorat Informasi dan Media, dan Biro Administrasi Menteri. (2015). *Diplomasi Indonesia 2014*. Jakarta Pusat: DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA, DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK, KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA.
- Effendi, R. (2017, Oktober 24). *Politik Luar Negeri Era Jokowi*. Dipetik Maret 22, 2018, dari Antara News.com:  
<https://babel.antaranews.com/berita/66148/politik-luar-negeri-era-jokowi>
- Kardi, D. D. (2017, Agustus 28). *Menteri Agama Pantau Langsung Pelaksanaan Haji 2017 di Jeddah*. Dipetik Maret 7, 2019, dari CNN Indonesia:  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170821130345-20-236172/menteri-agama-pantau-langsung-pelaksanaan-haji-2017-di-jeddah>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia . (t.thn.). *Diplomasi 2011*. Dipetik Desember 5, 2018, dari kemlu.go.id:  
<https://www.kemlu.go.id/Buku/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202011.pdf>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2016, Agustus 3). *Peningkatan Hubungan Ekonomi Warnai peringatan 40 Tahun RI-Qatar*. Dipetik Maret 22, 2018, dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia:  
<https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Peningkatan-Hubungan-Ekonomi-Warnai-Peringatan-40-tahun-RI-Qatar.aspx>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2017, Juni 15). *Menlu Retno Terima Utusan Khusus UEA Bahas Krisis Qatar*. Dipetik Desember 4, 2018, dari Kementerian Luar Negeri:  
<https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-Retno-Terima-Utusan-Khusus-UEA-Bahas-Krisis-Qatar.aspx>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2017, Juni 15). *Menlu Retno Terima Utusan Khusus UEA Bahas Krisis Qatar*. Dipetik November 15, 2019, dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia:  
<https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-Retno-Terima-Utusan-Khusus-UEA-Bahas-Krisis-Qatar.aspx>
- Kertopati, L. (2017, Juni 7). *Qatar Dikucilkan Negara Arab, Dubes RI Sebut WNI Aman*. Dipetik Januari 16, 2019, dari CNN Indonesia:  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170607073916-120-219927/qatar-dikucilkan-negara-arab-dubes-ri-sebut-wni-aman>
- Kompas. (2017, Juni 8). *Terkait Krisis di Qatar, TKI Diimbau Tingkatkan Komunikasi dengan KBRI*. Dipetik Maret 1, 2019, dari Kompas.com:  
<https://biz.kompas.com/read/2017/06/>

08/184903428/terkait.krisis.di.qatar.tki  
.diimbau.tingkatkan.komunikasi.denga  
n.kbri

Pratama, A. B. (2017, Juni 7). *JK: Indonesia Tak Berpihak Dalam Krisis Diplomati Qatar*. Dipetik Januari 12, 2019, dari CNN Indonesia:  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170607202746-106-220177/jk-indonesia-tak-berpihak-dalam-krisis-diplomatik-qatar>

Priyanto, C. A. (2017, Juni 8). *Dampak Krisis Qatar Terhadap Indonesia Menurut Menteri Enggar*. Dipetik Januari 20, 2019, dari Tempo.co:  
<https://bisnis.tempo.co/read/882528/dampak-krisis-qatar-terhadap-indonesia-menurut-menteri-enggar/full&view=ok>

Ratya, M. P. (2017, Juni 10). *Wakil Ketua MPR soal Krisis Qatar: Indonesia Harus Wujudkan Islah*. Dipetik Februari 25, 2019, dari Detik News:  
<https://news.detik.com/berita/d-3526236/wakil-ketua-mpr-soal-krisis-qatar-indonesia-harus-wujudkan-islah>

Waluyo, A. (2017, Juni 13). *Indonesia Siap Ambil Peran Solutif Krisis Qatar*. Dipetik Mei 5, 2018, dari Voa Indonesia:  
<https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-siap-ambil-peran-solutif-krisis-qatar/3898210.html>